

Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Sekretariat Daerah Kab Garut)

Sandi Abdul Aziz¹, Jusman Iskandar², Gugun Geusan Akbar³

^{1, 2, 3}Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹24091118026@pasca.uniga.ac.id

²jusman.iskandar@uniga.ac.id

³gugun.geusanakbar@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini sebanyak 53 orang pejabat struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (*path analysis*). Analisis deskripsi variabel Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah menunjukkan kriteria Baik, dengan indikator tertinggi pada dimensi komunikasi sedangkan indikator terendah pada dimensi Sumber Daya. analisis deskripsi variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat menunjukkan kriteria baik dengan Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Early Stage atau Clarity of Objective dan Persentase terendah terdapat pada dimensi Early Stage atau Clarity of Objective dan hasil analisis deskripsi variabel Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah menunjukkan kriteria baik Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Produksi dan Persentase terendah terdapat pada dimensi Kepuasan. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretariat daerah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel koordinasi pejabat struktural antar bagian sekretariat dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap koordinasi pejabat struktural antar bagian sekretariat, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Pelaksanaan Kebijakan.

1. Pendahuluan

Dalam Peraturan Bupati Garut No 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut disebutkan bahwa unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin

oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sedangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, mengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana serta sarana pemerintahan daerah.

Terkait dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten, sebagai Kepala Daerah, Bupati dituntut untuk memiliki kemampuan akses dan implementasi (pelaksanaan) kebijakan teknis terhadap seluruh aspek kegiatan kedinasan seluruh jajaran dinas dan staf di bawahnya, serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan di wilayah kerjanya. Hal ini tentunya harus dibantu oleh sekretaris daerah melalui sejumlah staf yang mengurus dan mengimplementasikan berbagai agenda kebijakan kepala daerah melalui dukungan teknis maupun administratif sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian awal terdapat fenomena masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang diduga disebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yakni terkait implementasi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, hal ini terlihat dalam permasalahan LKPJ 2018 dan RPJMD 2014-2019 antara lain:

1. Dalam aspek perumusan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah belum berjalan optimal, hal dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan kebijakan belum mencerminkan kecukupan kompetensi untuk membuat formulasi kebijakan Publik yang memiliki skala prioritas berdasarkan permasalahan sosial yang ada. Sebuah Keputusan yang berbentuk Perda, Perkada, SK Bupati dan lainnya saat ini dijalankan melalui pendekatan konvensional sehingga pemerintahan dalam kondisi tertentu dijalankan atas dasar hukum yang dibentuk dari *politic historical* berbasis kepentingan-kepentingan tertentu yang berputar di kepentingan proyek-proyek pengadaan dan perputaran transaksional jabatan-jabatan.
2. Dalam aspek administrasi penyelenggaraan administrasi pemerintah masih terdapat permasalahan seperti masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Pengelolaan sumber daya aparatur masih terdapat masalah utama dalam hal alokasi, kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut daerah masih belum seimbang, serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi.

Sejumlah permasalahan terkait efektivitas tugas-tugas Kepala Daerah yang dipengaruhi pelaksanaan kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah yang belum optimal. Berbagai upaya pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan efektivitas tugas-tugas kepala daerah telah dilakukan yakni melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: optimalisasi Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan mengadakan kegiatan peningkatan capacity building tiap bagian di Sekretariat Daerah, mendorong peningkatan SDM Aparatur melalui diklat pimpinan untuk tiap-tiap eselon, serta sosialisasi terkait peraturan dan perundang undangan yang berlaku,

mengadakan briefing SKPD dan briefing Sekretariat Daerah, serta mendorong motivasi kerja dengan meningkatkan tunjangan pegawai di Kabupaten Garut khususnya di Sekretariat Daerah.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, dapat di gambarkan aspek-aspek permasalahan dari setiap variabel dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah belum optimal hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah dan koordinasi pejabat struktural antar bagian Sekretariat belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Koordinasi pejabat struktural antar bagian struktural Sekretariat Daerah masih belum optimal hal tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi rapat koordinasi antar pejabat struktural yang masih kurang, serta dalam beberapa pengambilan keputusan tertentu terkadang tidak dilibatkan antar satu dengan pejabat lainnya.
3. Pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah belum optimal hal ini terlihat dari masih terdapatnya sebagian program kepala daerah yang belum tercapai serta berbagai program yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti menduga adanya hubungan sebab-akibat (*causal effectual*) yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah belum optimal, yakni karena permasalahan pada koordinasi pejabat struktural antar bagian sekretariat yang diasumsikan dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah yang belum optimal. Asumsi antara keterkaitan variabel-variabel ini merujuk pada teori menurut Islamy (dalam Iskandar, 2019: 215), bahwa implementasi suatu kebijaksanaan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat yang menjadi objek sasaran kebijakan

Dari berbagai persoalan yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar belakang ini, maka penulis memandang perlu melakukan penelitian yang relevan terkait dengan **“Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural antar Bagian Sekretariat dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah”**.

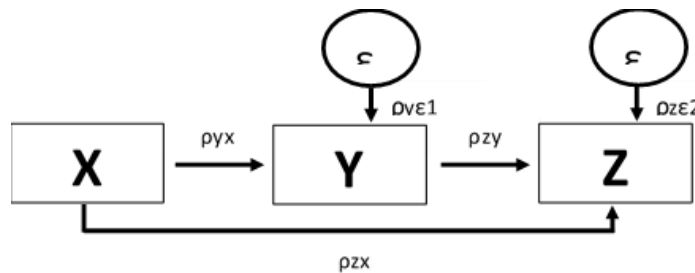
2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Menurut Iskandar (2013: 174) bahwa penelitian deskriptif ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua fenomena atau lebih. Metode penelitian deskriptif dapat memperluas ruang lingkup menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

Beberapa variabel penelitian yang telah dirumuskan pada tingkat dimensi tentunya dapat dioperasionalkan dengan baik. Oleh karena itu kebutuhan analisis perlu diturunkan sampai tingkat indikator dari masing-masing variabel tersebut sehingga memudahkan pengukuran variabel-variabel pokok penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian ini meliputi dimensi-dimensi dan indikator- indikator yang akan mengarahkan tersusunnya alat instrumen atau alat ukur penelitian. Operasionalisasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terlihat pada tabel berikut :

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baik secara praktis maupun teoritis berkaitan dengan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah. Hasil Penelitian ini tergambar dalam paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

3.1 Hasil Penelitian

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan model analisis jalur (*path anlisis*) berkaitan dengan pengujian hipotesis utama (simultan) maupun pengujian sub-sub hipotesis (simultan) dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F _{hitung}	F _{tabel}	Determinasi	Hubungan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y) Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)	0,7146	17,0443	3,187	0,5106	Positif signifikan
Sub-sub hipotesis	Koefisien Jalur	t _{hitung}	t _{tabel}	Determinasi	Hubungan
Pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y)	0,8034	9,6369	2,010	64,55%	Positif signifikan
Pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)	0,5618.	1,0730	2,010	11,37%	Tidak Positif signifikan
Pengujian Sub Hipotesis Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)	0,1801.	3,9786	2,010	39,69%	Positif signifikan

Dari hasil analisis menggunakan statistika dengan metode analisis jalur, maka diperoleh hasil bahwa secara simultan maupun parsial, Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah berpengaruh Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, hasil analisis deskripsi variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah menunjukkan kriteria Baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi komunikasi yaitu Pelaksanaan kebijakan Sekretariat Daerah telah di sampaikan secara jelas oleh Sekretaris Daerah Kepada Seluruh Pejabat Struktural antar Bagian Sekretariat. Persentase terendah terdapat pada dimensi Sumber Daya yaitu Seluruh sumberdaya aparatur di tiap bagian Sekretariat Daerah Kab. Garut memiliki kualitas kompetensi yang mumpuni.

Kedua, hasil analisis deskripsi variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat menunjukkan kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi *Early Stage atau Clarity of Objective* yaitu pejabat struktural antar bagian Sekretariat mengetahui kejelasan tupoksi Sekretariat daerah. Persentase terendah terdapat pada dimensi *Early Stage atau Clarity of Objective* yaitu pejabat struktural antar bagian Sekretariat menyadari pentingnya koordinasi antara pejabat structural agar kegiatan berjalan efektif.

Ketiga, hasil analisis deskripsi variabel Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah menunjukkan kriteria baik, hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai variabel tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Produksi yaitu Tercapainya berbagai program kepala daerah di seluruh bagian sekretariat. Persentase terendah terdapat pada dimensi Kepuasan yaitu Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas pencapaian program program kepala daerah.

3.2.1 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yx}) sebesar **0,8034**. Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975 ; 53}$) yaitu $t_{hitung} = 9,6369 > t_{tabel} = 2,010$.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan retribusi Pasar, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan

pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975;74}$) yaitu $t_{hitung} = 4,9168 > t_{tabel} = 1,993$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Retribusi Pasar berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan retribusi pasar.

Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat. Adapun besar pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat Daerah terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat 64,55% sedangkan sisanya sebesar 0,3545 dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel kebijakan kepegawaian yang tidak dimasukkan kedalam model.

3.2.2 Pengujian Sub Hipotesis Pelaksanaan Kebijakan Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (X) Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur dan diperoleh nilai koefisien jalur (P_{zx}) sebesar 0,5618. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975;91}$) yaitu $t_{hitung} = 1,0730 < t_{tabel} = 2,010$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat Daerah tidak berpengaruh signifikan Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

Besar pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah adalah sebesar 11,37% sedangkan sisanya sebesar 88,63% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat Daerah yang tidak dimasukkan kedalam model.

3.2.3 Pengujian Sub Hipotesis Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat (Y) Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah (Z)

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P_{yz}) sebesar **0,1801**.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{0,975;53}$) yaitu $t_{hitung} = 3,9786 > t_{tabel} = 2,010$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat memberikan pengaruh nyata dan positif terhadap Terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah. Besar pengaruh variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian terhadap Efektivas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah sebesar 39,69% sedangkan

sisanya sebesar 60,31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian yang tidak dimasukan kedalam model.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkenaan Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Baik;

- a. Hasil pengujian hipotesis utama dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.
- b. Hasil pengujian sub hipotesis pertama pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat.
- c. Hasil pengujian sub hipotesis kedua pengaruh Pelaksanaan Kebijakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.
- d. Hasil pengujian sub hipotesis kedua pengaruh Koordinasi Pejabat Struktural Antar Bagian Sekretariat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepala Daerah.

Daftar Pustaka

I. Buku – Buku

- Bungin, Burhan, 2013, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi, Kencana, Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2010 *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William, N., 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Penyunting Muhadjir Darwin, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan. 2010. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Dwijowijoto, R.N., 2010. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Computindo
- Elmi, Bachrul. 2010. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gibson, J.L., J.M. Ivancevich dan J.H. Donnelly Jr. 2001. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Jilid VI Edisi 6. Terjemahan : Agus Dharma. Erlangga. 2010
- Handyaningrat, Soewarno, 2010, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta

- Hasibuan, Malayu, SP, 2010, *Manajemen Dasar: Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Handoko, T Hani, 2013, *Manajemen Personalial dan Sumberdaya Manusia*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Iskandar, Jusman, 2016, *Kapita Selekta Administrasi dan Kebijakan Publik*. Puspaga, Bandung.
- _____, 2019, *Bunga Rampai Administrasi Negara*, Edisi Ke Dua Puluh, Puspaga, Bandung.
- _____, 2019, *Teori Sosial*, Puspaga, Bandung.
- _____, 2019, *Indeks dan Skala dalam penelitian*, Puspaga, Bandung.
- _____, 2019a, *Manajemen Publik*, Puspaga, Bandung.
- _____, 2019, *Metode Penelitian Sosial*, Puspaga, Bandung.
- Iskandar, Jusman dan Putradi, Didit, 2013, *Teori Administrasi*, Puspaga, Bandung.
- Islamy, Irfan, 2010, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, M. , 2010. *Manajemen Pelayanan Publik* . Jakarta : Bina Aksara
- Kadarmanto, A.M., Jusuf Udaya. 2010. *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: PT Prenhallindo
- Kusdi. 2010. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Salemba Humanika
- Mangkunegara, A.A.A.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja, A.R. 2010. *Manajemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : LAN dan Duta Pertiwi Foundation
- Nasution, Zulkarnaen. 2010. *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*. UPT Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Poewadarmita, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rachmiate, Atie. 2010. *Etiket Keprotokolan*. FIKOM UNISBA Bandung.
- Riduwan. 2010. *Dasar-Dasar Statistika*. Alfabeta, Bandung.
- Robbins, Stephen P., 2010. *Essentials of Organizational Behavior*. New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Robbins, Stephen, P., 2006, *Perilaku Organisasi Edisi Kespuluh*, Penyunting Ahmad Fauzi, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sarundajang, 2010. *Pemerintah Daerah di Beberapa Negara : Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan, Kondisi, dan Tantangan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sayeketi, Moh Rofi Adji, 2010. *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Cetakan Kedua, , Penerbit Cempaka Putih, Klaten.
- Simamora, H. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Siswanto, Sastrohardiwiryo. 2010. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Steers, James M. 2010. *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan : Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta
- Siregar, Syofian, 2012, *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*, PT Rajagrafindo Persada, Depok.
- Silalahi, Ulber, 2011, *Asas-Asas Manajemen*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti, 2011, *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*, Cetakan kedua. Penerbit CV Mandar Maju. Bandung
- Sutrisno, Edy 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudarmanto, 2009, *Kinerja Pengembangan Kompetensi SDM*, edisi pertama,
- Sudjana, 2002, *Metode Statistika*, Tarsiti, Bandung.
- Thoha, Miftah. 2009. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Program Pascasarjana, Universitas Garut, 2019, *Pedoman Penyusunan Thesis*.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2010. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2010. *Manajemen Publik*. Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta

- Thoha, Miftah, 2010. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, 2010. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kelima, Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Med Press, Yogyakarta.

II. Jurnal dan Penelitian Ilmiah

- A.Tafaqur Salamun (2014) Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan
- Amir, Tatang 2011 Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jurnal Universitas Sam Ratulangi Vol. 10 2011
- Dadang, Garinda, 2010 Peran Kepala Daerah dalam Mewujudkan efektivitas Ketahanan Nasional, Jurnal IPB Vol. 18 Tahun 2010, Institut Pertanian Bogor.
- Illiyyun Firdausih (2011), Efektivitas peran dan tugas Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Bangkalan, Universitas Airlangga, Jawa Timur
- Muhammad Hussaini (2010), Peranan koordinasi Bagian keSekretariatan Setda Bantul, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.
- I Nengah. 2011. *Fungsi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Daerah sesuai dengan Prinsip-prinsip Demokrasi*. Tesis. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana. Universitas Udayana, Denpasar Bali

III. Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019.
- Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut
- Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
- Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- Laporan Kinerja dan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun 2018;
- Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Garut 2019.